

Implementasi Kebijakan Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Singkil

Syukri

Universitas Senior Medan, Jl. Jamin Ginting KM 8,5 No. 13, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia 20141.

Email Korespondensi: dilon9504@gmail.com

Abstrak

Implementasi kebijakan bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting dalam penanggulangan kemiskinan, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan terutama pada wilayah dengan karakter geografis kompleks. Studi sebelumnya lebih banyak membahas efektivitas program bantuan sosial dan ketepatan sasaran penerima manfaat, sementara kajian mengenai bagaimana faktor implementasi kebijakan, pengelolaan DTKS-SIKS-NG, kapasitas birokrasi lokal, dan hambatan geografis berinteraksi dalam pelaksanaan bantuan sosial pada wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan perspektif komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam model implementasi Edwards III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan 18 informan yang terdiri atas pegawai Dinas Sosial, operator DTKS/SIKS-NG, pendamping sosial, aparatur gampong, dan penerima bantuan sosial. Data dianalisis menggunakan model Miles et al. melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial di Kabupaten Aceh Singkil telah berjalan melalui mekanisme pendataan, verifikasi, validasi, koordinasi, dan penyaluran bantuan. Namun, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterlambatan pemutakhiran DTKS, keterbatasan kapasitas pelaksanaan, belum optimalnya komunikasi kebijakan kepada masyarakat, serta hambatan akses layanan pada wilayah pesisir dan kepulauan. Penelitian ini menunjukkan bahwa karakter geografis dan kapasitas administrasi lokal menjadi faktor kontekstual yang memperkuat atau membatasi keberhasilan implementasi kebijakan bantuan sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara model implementasi kebijakan Edwards III dengan dinamika pengelolaan DTKS-SIKS-NG pada wilayah dengan karakter geografis kompleks. Penelitian merekomendasikan penguatan pemutakhiran data secara berkala, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta pengembangan mekanisme pelayanan sosial yang adaptif terhadap kondisi geografis daerah.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Bantuan Sosial; Masyarakat Miskin; Dinas Sosial; Aceh Singkil.

Implementation of Social Service Policy in Distributing Social Assistance to Poor Communities in Aceh Singkil Regency

Abstract

Social assistance policy implementation represents an important instrument for poverty alleviation; however, its effectiveness remains challenging, particularly in regions with complex geographical characteristics. Previous studies have mainly focused on social assistance effectiveness and beneficiary targeting accuracy, while limited attention has been given to how policy implementation factors, DTKS-SIKS-NG data management, local bureaucratic capacity, and geographical barriers interact in implementing social assistance policies across mainland, coastal, and island areas. This study aims to analyze the implementation of social assistance policies by the Social Affairs Office of Aceh Singkil Regency based on Edwards III's implementation framework, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving 18 informants consisting of Social Affairs Office staff, DTKS/SIKS-NG operators, social assistance facilitators, village officials, and beneficiaries. Data were analyzed using Miles et al.'s interactive model through data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that social assistance implementation in Aceh Singkil has been carried out through beneficiary data collection, verification, validation, coordination, and distribution mechanisms. However, implementation effectiveness remains constrained by delayed DTKS updating, limited implementation capacity, insufficient policy communication, and accessibility challenges in coastal and island areas. This study highlights that geographical characteristics and local administrative capacity serve as contextual factors influencing the success of social assistance implementation. The novelty of this research lies in integrating Edwards III's policy implementation framework with DTKS-SIKS-NG management dynamics in a geographically complex region. The study recommends strengthening periodic data updating, improving the capacity of policy implementers, enhancing interinstitutional coordination, and developing adaptive social service mechanisms responsive to local geographical conditions.

Keywords: Policy Implementation; Social Assistance; Poor Communities; Social Affairs Office; Aceh Singkil.

How to Cite: Syukri, S. (2026). Implementasi Kebijakan Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Singkil. *Empiricism Journal*, 7(2), 2171-2182. <https://doi.org/10.36312/ej.v7i2.5863>



<https://doi.org/10.36312/ej.v7i2.5863>

Copyright© 2026, Syukri.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) License.



PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan sosial dan pembangunan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta layanan publik lainnya. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kebijakan perlindungan sosial yang mampu mengurangi kerentanan kelompok masyarakat miskin dan rentan (Todaro & Smith, 2021). Salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mendukung perlindungan sosial tersebut adalah melalui program bantuan sosial yang berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga konsumsi rumah tangga, mengurangi risiko sosial ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Barrientos, 2013; World Bank, 2022).

Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang masih menghadapi tantangan kemiskinan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, persentase penduduk miskin menunjukkan tren penurunan dari 20,36% pada tahun 2021 menjadi 19,06% pada tahun 2024 (BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2025). Selanjutnya, data terbaru tahun 2025 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Aceh Singkil berada pada angka 17,07% dengan garis kemiskinan sebesar Rp619.322 per kapita per bulan. Perbedaan data tersebut menunjukkan perkembangan temporal tingkat kemiskinan, di mana data 2021–2024 menggambarkan tren perubahan kemiskinan, sedangkan data 2025 memberikan gambaran kondisi terbaru. Meskipun mengalami penurunan, angka tersebut masih menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Aceh Singkil berada dalam kondisi rentan sehingga kebijakan bantuan sosial tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung perlindungan sosial masyarakat miskin.

Persoalan kemiskinan di Aceh Singkil tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi geografis wilayah yang terdiri atas kawasan daratan, pesisir, dan kepulauan. Karakteristik wilayah tersebut memberikan tantangan tersendiri dalam penyediaan pelayanan publik, termasuk proses pendataan masyarakat miskin, verifikasi penerima bantuan, penyampaian informasi kebijakan, serta distribusi bantuan sosial. Masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan kepulauan memiliki potensi menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan administrasi, informasi, dan program pemerintah dibandingkan masyarakat yang berada di wilayah pusat pemerintahan (Bappenas, 2020). Oleh karena itu, implementasi bantuan sosial di daerah dengan karakter geografis kompleks membutuhkan strategi kebijakan yang mampu menyesuaikan antara desain program dengan kondisi lokal masyarakat.

Secara normatif, kebijakan penanganan kemiskinan di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa penanganan fakir miskin merupakan upaya yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan serta perlindungan sosial (Republik Indonesia, 2011). Dalam konteks implementasi di tingkat daerah, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam memastikan proses pendataan, pengusulan, verifikasi, validasi, koordinasi, dan penyaluran bantuan sosial berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan. Salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah dalam menentukan penerima manfaat adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang didukung oleh Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai sistem pengelolaan dan pemutakhiran data kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial RI, 2022).

Namun, keberhasilan bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan sistem pendataan, tetapi sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di tingkat lapangan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan utama dalam program bantuan sosial sering berkaitan dengan akurasi data penerima manfaat, mekanisme targeting, koordinasi antaraktor, dan kapasitas institusi pelaksana. Coady et al. (2004) menjelaskan bahwa efektivitas program transfer sosial sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menentukan sasaran penerima secara tepat karena kesalahan inklusi (inclusion error) dan eksklusi (exclusion error) dapat mengurangi efektivitas program. Sementara itu, Barrientos (2013) menegaskan bahwa bantuan sosial memang mampu mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat miskin, tetapi dampaknya akan lebih optimal apabila didukung oleh kebijakan pemberdayaan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. World Bank (2022) juga menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial yang efektif membutuhkan integrasi data, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terjadi pada tahap pelaksanaan. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi kebijakan disampaikan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Sumber daya mencakup ketersediaan aparatur, fasilitas, anggaran, serta sistem informasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Disposisi berkaitan dengan komitmen dan sikap pelaksana, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, prosedur kerja, dan koordinasi antarorganisasi. Selain itu, Grindle (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan lingkungan tempat kebijakan tersebut diterapkan. Perspektif ini menjadi penting dalam memahami implementasi bantuan sosial di Aceh Singkil yang memiliki karakteristik wilayah dan tantangan pelayanan yang berbeda dibandingkan daerah lainnya.

Meskipun kajian mengenai implementasi bantuan sosial telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek efektivitas program, ketepatan sasaran, atau evaluasi administratif bantuan sosial. Kajian yang mengintegrasikan perspektif implementasi kebijakan dengan kondisi geografis wilayah kepulauan, kapasitas birokrasi lokal, serta mekanisme pemutakhiran data berbasis DTKS dan SIKS-NG masih relatif terbatas. Secara khusus, belum banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, kualitas data, dan hambatan geografis secara bersamaan memengaruhi implementasi bantuan sosial pada daerah seperti Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan empiris dan konseptual. Secara empiris, penelitian ini memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial pada wilayah dengan karakteristik daratan, pesisir, dan kepulauan. Secara konseptual, penelitian ini memperluas kajian implementasi kebijakan dengan menghubungkan model Edwards III dengan konteks lokal pengelolaan DTKS-SIKS-NG dan tantangan geografis daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat bantuan sosial sebagai proses distribusi bantuan, tetapi sebagai proses implementasi kebijakan publik yang dipengaruhi oleh interaksi antara aktor pemerintah, sistem informasi, kapasitas birokrasi, dan kondisi lingkungan kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi; (2) bagaimana mekanisme pendataan, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data penerima bantuan melalui DTKS dan SIKS-NG; serta (3) faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial pada masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Singkil.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial bagi

masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini tidak hanya melihat apakah bantuan sosial telah disalurkan kepada masyarakat, tetapi juga menganalisis bagaimana proses pendataan, verifikasi, validasi, koordinasi, penyaluran, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggambarkan pelaksanaan kebijakan secara nyata berdasarkan pengalaman pelaksana kebijakan dan masyarakat penerima bantuan sosial (Creswell & Poth, 2018; Merriam & Tisdell, 2016).

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa Aceh Singkil merupakan salah satu kabupaten yang masih menghadapi persoalan kemiskinan dan memiliki karakteristik wilayah yang cukup kompleks, meliputi wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan. Karakteristik tersebut menjadikan proses penyaluran bantuan sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berhubungan dengan akses geografis, ketersediaan data, koordinasi antarlevel pemerintahan, serta kemampuan aparatur dalam menjangkau masyarakat miskin dan rentan (Patton, 2015). Fokus penelitian diarahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil sebagai lembaga pelaksana urusan sosial di daerah, serta masyarakat miskin penerima bantuan sosial sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Pengumpulan data lapangan dilakukan pada bulan Maret hingga Juni 2025. Lokasi observasi dan wawancara mencakup tiga karakteristik wilayah geografis, yaitu: (1) wilayah daratan yang direpresentasikan oleh Kecamatan Singkil sebagai wilayah dengan akses pelayanan administrasi pemerintahan yang relatif lebih mudah; (2) wilayah pesisir yang direpresentasikan oleh Kecamatan Singkil Utara dengan karakteristik masyarakat yang banyak bergantung pada aktivitas ekonomi pesisir; dan (3) wilayah kepulauan yang direpresentasikan oleh Kecamatan Pulau Banyak yang memiliki keterbatasan transportasi dan komunikasi dalam pelayanan publik. Pemilihan lokasi tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai variasi pengalaman masyarakat, kondisi aksesibilitas, serta tantangan administratif dalam implementasi kebijakan bantuan sosial pada wilayah dengan karakter geografis yang berbeda.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial. Informan dalam penelitian ini meliputi pejabat atau pegawai Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil, operator atau pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan SIKS-NG, pendamping sosial, aparatur kecamatan atau gampong, serta masyarakat miskin penerima bantuan sosial. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, data penerima bantuan sosial, dokumen DTKS, peraturan perundang-undangan, publikasi Badan Pusat Statistik, serta sumber lain yang relevan dengan penelitian (Yin, 2018).

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung mereka dalam implementasi kebijakan bantuan sosial. Teknik purposive sampling digunakan karena tidak semua masyarakat memiliki informasi yang memadai mengenai proses implementasi kebijakan bantuan sosial. Kriteria pemilihan informan meliputi: (1) terlibat langsung dalam pelaksanaan program bantuan sosial; (2) memiliki pengalaman dalam pengelolaan, verifikasi, atau penerimaan bantuan sosial; (3) memahami mekanisme DTKS dan SIKS-NG; serta (4) bersedia memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian (Patton, 2015; Creswell & Poth, 2018). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 18 orang yang terdiri atas:

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Jumlah Informan	Kriteria Pemilihan Informan	Peran/Keterlibatan dalam Penelitian
1	Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	3 orang	Pegawai yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, validasi,	Memberikan informasi mengenai kebijakan, mekanisme pelaksanaan, koordinasi antarinstansi, serta kendala implementasi bantuan sosial

No	Kategori Informan	Jumlah Informan	Kriteria Pemilihan Informan	Peran/Keterlibatan dalam Penelitian
2	Operator DTKS dan SIKS-NG	2 orang	serta pengawasan program bantuan sosial Petugas yang terlibat langsung dalam pengelolaan, pemutakhiran, penginputan, dan validasi data kesejahteraan sosial	Memberikan informasi terkait proses pendataan, pemutakhiran data penerima bantuan, serta kendala teknis dalam penggunaan sistem informasi
3	Pendamping Sosial	3 orang	Pendamping yang aktif mendampingi masyarakat penerima bantuan sosial dan memiliki pengalaman dalam proses verifikasi serta pelayanan sosial	Memberikan informasi mengenai proses pendampingan, komunikasi dengan masyarakat, serta hambatan dalam penyaluran bantuan sosial
4	Aparatur Gampong	4 orang	Aparatur desa/gampong yang terlibat dalam identifikasi calon penerima, pengusulan data, dan koordinasi dengan Dinas Sosial	Memberikan informasi mengenai mekanisme pengusulan penerima bantuan, kondisi masyarakat miskin, serta koordinasi antara tingkat gampong dan kabupaten
5	Penerima Bantuan Sosial	6 orang	Masyarakat miskin penerima bantuan sosial yang terdaftar dalam program bantuan pemerintah dan berasal dari wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan	Memberikan informasi mengenai pengalaman menerima bantuan, akses pelayanan sosial, pemahaman terhadap mekanisme bantuan, serta kendala yang dihadapi
Total		18 orang		

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi mengenai mekanisme implementasi kebijakan bantuan sosial, mulai dari proses pendataan, pengusulan, verifikasi, validasi, penetapan penerima, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat. Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial, aparatur gampong, pendamping sosial, dan masyarakat penerima bantuan. Wawancara semi-terstruktur dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian dan kerangka implementasi kebijakan Edwards III. Setiap wawancara berlangsung selama kurang lebih 45–90 menit. Dengan persetujuan informan, proses wawancara direkam menggunakan perangkat audio dan kemudian ditranskripsikan secara verbatim. Selain itu, peneliti juga membuat catatan lapangan untuk mendokumentasikan konteks penelitian, hasil pengamatan, dan refleksi selama proses pengumpulan data. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelayanan sosial, aktivitas administrasi, serta interaksi antara pelaksana kebijakan dan masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi melalui penelusuran dokumen, foto kegiatan, laporan, data penerima bantuan, serta arsip yang berkaitan dengan kebijakan bantuan sosial (Sugiyono, 2023; Creswell & Poth, 2018).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument). Peneliti berperan sebagai pengumpul data, penafsir data, sekaligus penyusun hasil penelitian. Untuk membantu proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi, dan pedoman dokumentasi. Pedoman wawancara disusun berdasarkan

fokus penelitian, yaitu implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Aspek yang diteliti meliputi komunikasi kebijakan, sumber daya pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, struktur birokrasi, mekanisme pendataan, ketepatan sasaran, transparansi penyaluran, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan (Lincoln & Guba, 1985; Sugiyono, 2023).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model analisis data Miles et al. (2020), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap awal analisis dilakukan melalui proses transkripsi seluruh data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian data tersebut diorganisasikan berdasarkan fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan proses open coding dengan mengidentifikasi berbagai pernyataan, informasi penting, dan pola makna yang berkaitan dengan implementasi kebijakan bantuan sosial di Kabupaten Aceh Singkil. Kode-kode awal yang diperoleh kemudian dikelompokkan ke dalam kategori analisis yang disusun berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka implementasi kebijakan Edwards III (1980).

Berdasarkan proses coding tersebut, ditemukan beberapa tema utama yang menjadi fokus analisis penelitian. Tema pertama adalah komunikasi, yang mencakup proses penyampaian informasi mengenai program bantuan sosial, tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan mekanisme bantuan, serta pola komunikasi antara Dinas Sosial, pemerintah gampong, pendamping sosial, dan masyarakat penerima bantuan. Tema kedua adalah sumber daya, yang meliputi ketersediaan sumber daya manusia pelaksana, pemanfaatan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), serta ketersediaan sarana pendukung dan faktor aksesibilitas geografis dalam pelaksanaan kebijakan. Tema ketiga adalah disposisi pelaksana, yang berkaitan dengan komitmen aparatur dalam menjalankan kebijakan, responsivitas terhadap pengaduan masyarakat, serta integritas dan tanggung jawab pelaksana dalam proses penyaluran bantuan sosial. Tema keempat adalah struktur birokrasi, yang mencakup pembagian tugas antaraktor pelaksana, mekanisme koordinasi antarinstansi, serta prosedur verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial.

Selanjutnya, hasil analisis empiris dibandingkan dengan konsep teoritis implementasi kebijakan Edwards III untuk memahami keterkaitan antara kondisi lapangan dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan bantuan sosial. Proses analisis ini dilakukan dengan menginterpretasikan bagaimana aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berinteraksi dengan konteks lokal, khususnya karakteristik geografis wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan serta kapasitas administrasi pemerintah daerah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini dapat menjelaskan secara lebih komprehensif faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Singkil.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial, aparatur gampong, pendamping sosial, dan masyarakat penerima bantuan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda apabila ditemukan informasi yang belum konsisten. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi implementasi kebijakan bantuan sosial di Kabupaten Aceh Singkil (Lincoln & Guba, 1985; Creswell & Poth, 2018).

Fokus analisis dalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan yang menekankan empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Aspek komunikasi digunakan untuk melihat bagaimana informasi mengenai bantuan sosial disampaikan kepada aparatur pelaksana dan masyarakat. Aspek sumber daya digunakan untuk menganalisis ketersediaan pegawai, anggaran, sarana, sistem informasi, dan kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Aspek disposisi digunakan untuk melihat komitmen, sikap, dan tanggung jawab pelaksana kebijakan. Adapun aspek struktur birokrasi digunakan untuk menilai pembagian tugas, prosedur kerja, serta koordinasi antara Dinas Sosial, kecamatan, gampong, dan pihak terkait lainnya. Keempat aspek tersebut

merupakan indikator utama dalam model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edwards III (1980) dan banyak digunakan dalam penelitian implementasi kebijakan publik.

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti memperhatikan prinsip etika penelitian. Setiap informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, jenis data yang dikumpulkan, serta penggunaan data untuk kepentingan akademik. Persetujuan informan (informed consent) diberikan sebelum proses pengumpulan data dimulai. Identitas informan masyarakat dapat disamarkan untuk menjaga kerahasiaan dan kenyamanan informan. Data yang diperoleh digunakan secara objektif dan tidak dimanipulasi sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang valid mengenai implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Singkil (Israel & Hay, 2006; Creswell & Poth, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Singkil telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pendataan calon penerima bantuan, pengusulan data dari tingkat gampong, verifikasi dan validasi data, koordinasi dengan kecamatan dan pihak terkait, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima manfaat. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial tidak dilakukan secara langsung tanpa proses administratif, melainkan melalui mekanisme yang melibatkan beberapa aktor pemerintahan, mulai dari aparat gampong, kecamatan, pendamping sosial, operator data, hingga Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil. Proses implementasi seperti ini sejalan dengan konsep implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dan keterlibatan berbagai aktor agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif (Edwards III, 1980; Grindle, 1980). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, pelaksanaan bantuan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur administratif, tetapi juga oleh kemampuan aktor lokal dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan kondisi masyarakat. Informan dari Dinas Sosial menjelaskan bahwa *"Proses bantuan sosial sebenarnya sudah memiliki mekanisme yang jelas dari pusat, mulai dari DTKS sampai penyaluran. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan data yang masuk benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan, karena kondisi masyarakat bisa berubah setiap waktu."* (Informan Dinas Sosial-01)

Secara umum, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil memiliki peran penting dalam memastikan agar bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat miskin dan rentan. Peran tersebut mencakup pengelolaan data penerima bantuan, koordinasi pelaksanaan program, penanganan pengaduan masyarakat, serta pendampingan terhadap kelompok sasaran. Dalam praktiknya, bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat miskin tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi sementara, tetapi juga menjadi bagian dari sistem perlindungan sosial bagi keluarga yang mengalami keterbatasan pendapatan, kehilangan pekerjaan, memiliki anggota keluarga rentan, atau tinggal di wilayah dengan akses ekonomi terbatas. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa bantuan sosial merupakan instrumen perlindungan sosial yang bertujuan mengurangi kerentanan, menjaga konsumsi rumah tangga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (Barrientos, 2013; World Bank, 2022).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pendataan menjadi aspek paling penting dalam implementasi kebijakan bantuan sosial di Kabupaten Aceh Singkil. Data penerima bantuan pada dasarnya diperoleh melalui pengusulan dari tingkat gampong, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi sebelum diusulkan melalui sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Proses ini penting karena bantuan sosial hanya dapat berjalan efektif apabila data penerima benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa data masyarakat miskin yang belum diperbarui, perubahan kondisi ekonomi keluarga yang tidak segera tercatat, serta adanya masyarakat yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum masuk dalam data penerima. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kualitas data menjadi faktor penentu ketepatan sasaran program bantuan sosial. Temuan ini mendukung hasil penelitian Coady et al. (2004) yang menyatakan bahwa akurasi data sasaran merupakan prasyarat utama efektivitas program bantuan sosial, serta sejalan dengan kebijakan Kementerian Sosial

Republik Indonesia yang menempatkan DTKS dan SIKS-NG sebagai basis utama dalam penetapan penerima manfaat (Kementerian Sosial RI, 2022).

Selain persoalan data, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Aceh Singkil menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penyaluran bantuan sosial. Aceh Singkil memiliki karakteristik wilayah yang terdiri atas kawasan daratan, pesisir, dan kepulauan. Kondisi ini menyebabkan proses pelayanan sosial tidak selalu berjalan sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Masyarakat yang tinggal di wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan relatif lebih mudah memperoleh informasi dan mengakses pelayanan, sedangkan masyarakat di wilayah terpencil atau kepulauan menghadapi tantangan berupa jarak, biaya transportasi, keterbatasan jaringan komunikasi, dan akses informasi yang lebih terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor geografis berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan publik, terutama dalam penyediaan layanan sosial di daerah dengan karakteristik wilayah yang beragam. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2020) yang menyebutkan bahwa daerah kepulauan dan wilayah terpencil masih menghadapi kesenjangan akses terhadap pelayanan publik dan perlindungan sosial, sehingga memerlukan strategi implementasi yang lebih adaptif. *“Untuk menjangkau penerima di wilayah kepulauan tidak sama dengan wilayah daratan. Kadang harus menyesuaikan jadwal transportasi laut sehingga proses pendampingan membutuhkan waktu lebih lama.”* (Informan Pendamping Sosial-02)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, masyarakat penerima bantuan sosial pada umumnya menilai bahwa bantuan yang diberikan pemerintah sangat membantu pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Bantuan sosial digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa bantuan sosial telah menjalankan fungsi jangka pendek sebagai *social safety net* yang mampu mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga miskin. Namun, masyarakat juga menyampaikan bahwa bantuan sosial belum sepenuhnya mampu mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan. Bantuan sosial lebih banyak dirasakan sebagai bentuk keringanan beban ekonomi, bukan sebagai solusi utama untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga miskin. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Barrientos (2013) yang menyatakan bahwa bantuan sosial berfungsi sebagai perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi, tetapi tidak dapat secara otomatis mengentaskan kemiskinan tanpa didukung oleh program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perluasan kesempatan kerja. Temuan ini juga didukung oleh laporan World Bank (2022) yang menegaskan bahwa efektivitas bantuan sosial dalam menurunkan kemiskinan akan lebih optimal apabila diintegrasikan dengan kebijakan peningkatan produktivitas dan pembangunan ekonomi lokal.

Tabel berikut menyajikan ringkasan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Singkil.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Penelitian

Aspek Implementasi	Temuan Penelitian	Implikasi
Pendataan penerima bantuan	Pendataan dilakukan melalui pengusulan dari gampong, verifikasi, validasi, dan pengelolaan data oleh Dinas Sosial	Kualitas data menjadi faktor utama ketepatan sasaran bantuan sosial
Komunikasi kebijakan	Informasi disampaikan melalui aparatur gampong, kecamatan, pendamping sosial, dan Dinas Sosial	Komunikasi belum selalu merata, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil
Sumber daya pelaksana	Pelaksanaan melibatkan pegawai Dinas Sosial, operator data, aparatur gampong, dan pendamping sosial	Keterbatasan jumlah aparatur dan sarana dapat memperlambat proses verifikasi lapangan
Koordinasi antaraktor	Koordinasi dilakukan antara Dinas Sosial, kecamatan, gampong, dan pihak terkait	Koordinasi masih perlu diperkuat agar data dan

Aspek Implementasi	Temuan Penelitian	Implikasi
Ketepatan sasaran	Bantuan diarahkan kepada masyarakat miskin dan rentan yang terdata dalam basis data kesejahteraan sosial	penyaluran bantuan lebih sinkron Masih terdapat potensi inclusion error dan exclusion error akibat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat
Kondisi geografis	Wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan memengaruhi akses pelayanan sosial	Wilayah jauh dari pusat layanan membutuhkan pendekatan pelayanan yang lebih adaptif
Dampak bantuan sosial	Bantuan sosial membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin	Dampak masih bersifat jangka pendek jika tidak didukung program pemberdayaan ekonomi

Ditinjau dari aspek komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai bantuan sosial telah dilakukan melalui berbagai jalur, yaitu Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, aparat gampong, serta pendamping sosial. Informasi yang disampaikan meliputi mekanisme pengusulan penerima bantuan, persyaratan administrasi, proses verifikasi dan validasi, serta jenis bantuan sosial yang dapat diterima masyarakat. Meskipun demikian, komunikasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih ditemukan masyarakat yang belum memahami prosedur pengusulan bantuan maupun mekanisme pembaruan data DTKS. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa bantuan sosial merupakan hak yang diberikan secara otomatis oleh pemerintah sehingga tidak memahami pentingnya proses pendataan dan verifikasi. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya keluhan ketika terdapat masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan. Temuan ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*) sebagaimana dikemukakan Edwards III (1980). Oleh karena itu, komunikasi kebijakan perlu diperkuat melalui sosialisasi yang lebih intensif dengan melibatkan pemerintah gampong, tokoh masyarakat, dan pendamping sosial agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan. Salah satu aparat gampong menyampaikan *"Kalau di wilayah kami, masyarakat masih banyak yang bertanya langsung ke kantor desa karena tidak semua memahami informasi dari aplikasi atau media sosial. Kadang informasi bantuan sudah turun, tetapi masyarakat belum mengetahui prosesnya."* (Informan Aparatur Gampong-02).

Aspek sumber daya juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan bantuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil telah memiliki sumber daya manusia yang melibatkan pegawai dinas, operator DTKS, pendamping sosial, aparat kecamatan, dan aparat gampong dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Selain itu, penggunaan aplikasi SIKS-NG telah membantu proses pendataan, pemutakhiran, dan verifikasi data penerima bantuan secara lebih sistematis. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa jumlah aparat yang tersedia masih relatif terbatas dibandingkan dengan luas wilayah pelayanan yang mencakup daerah daratan, pesisir, dan kepulauan. Keterbatasan tersebut menyebabkan proses verifikasi lapangan dan pemutakhiran data belum dapat dilakukan secara optimal. Kondisi geografis yang sulit dijangkau juga meningkatkan biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pendataan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Edwards III (1980) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, baik berupa sumber daya manusia, fasilitas, anggaran, maupun informasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Operator DTKS menjelaskan bahwa: *"Pemutakhiran data membutuhkan waktu karena jumlah masyarakat yang harus diverifikasi cukup banyak. Selain itu, kondisi lapangan membuat tidak semua data bisa langsung diperbarui ketika ada perubahan kondisi penerima."* (Informan Operator DTKS-01)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa akurasi data penerima bantuan masih menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan bantuan sosial di Kabupaten Aceh Singkil. Proses pendataan dilakukan melalui usulan pemerintah gampong yang kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial sebelum diinput ke dalam DTKS. Meskipun mekanisme tersebut telah sesuai dengan ketentuan pemerintah, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berlangsung sangat dinamis menyebabkan data penerima bantuan sering kali belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Beberapa keluarga yang sebelumnya tergolong miskin mengalami peningkatan kondisi ekonomi, sedangkan keluarga lain justru mengalami penurunan kesejahteraan akibat kehilangan pekerjaan, sakit, atau faktor ekonomi lainnya. Apabila proses pemutakhiran data tidak dilakukan secara berkala, maka akan muncul *inclusion error*, yaitu bantuan diterima oleh masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat, maupun *exclusion error*, yaitu masyarakat miskin yang layak menerima bantuan justru belum tercatat sebagai penerima. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Coady et al. (2004) yang menyatakan bahwa kualitas data sasaran merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas program perlindungan sosial.

Dari aspek disposisi pelaksana, penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur Dinas Sosial, operator DTKS, dan pendamping sosial pada umumnya memiliki komitmen yang cukup baik dalam melaksanakan tugasnya. Sikap responsif terhadap masyarakat terlihat melalui upaya memberikan penjelasan mengenai prosedur bantuan sosial, menerima pengaduan masyarakat, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah gampong apabila ditemukan permasalahan dalam data penerima bantuan. Meskipun demikian, tingginya ekspektasi masyarakat terhadap bantuan sosial sering kali menimbulkan tekanan bagi pelaksana kebijakan, terutama ketika terdapat masyarakat yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar dalam DTKS. Dalam situasi tersebut, pelaksana dituntut untuk bersikap profesional, objektif, dan berpedoman pada data yang telah diverifikasi. Sikap pelaksana yang terbuka terhadap pengaduan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program bantuan sosial.

Selanjutnya, dari aspek struktur birokrasi, implementasi kebijakan bantuan sosial di Kabupaten Aceh Singkil melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga, yaitu Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah gampong, pendamping sosial, serta instansi terkait lainnya. Pembagian tugas yang jelas memungkinkan setiap pihak menjalankan fungsi sesuai kewenangannya masing-masing. Pemerintah gampong bertugas mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan mengusulkan calon penerima bantuan, sedangkan Dinas Sosial melakukan verifikasi, validasi, dan pengelolaan data melalui DTKS. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterlambatan penyampaian informasi, perbedaan data antara tingkat gampong dan kabupaten, serta keterbatasan koordinasi dalam proses pemutakhiran data. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi melalui pertemuan rutin, penyusunan standar operasional prosedur yang lebih jelas, serta integrasi sistem informasi agar setiap perubahan data masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.

Selain faktor administratif, karakteristik geografis Kabupaten Aceh Singkil menjadi salah satu faktor yang sangat memengaruhi implementasi kebijakan bantuan sosial. Kabupaten ini memiliki wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan yang menyebabkan akses pelayanan publik tidak merata. Masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, seperti Pulau Banyak, menghadapi keterbatasan transportasi, biaya perjalanan yang relatif tinggi, serta jaringan komunikasi yang belum sepenuhnya stabil. Kondisi tersebut menyebabkan proses pendataan, verifikasi lapangan, maupun penyampaian informasi mengenai bantuan sosial membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan wilayah yang berada di pusat pemerintahan. Dengan demikian, implementasi kebijakan bantuan sosial di Aceh Singkil memerlukan pendekatan pelayanan yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah agar prinsip pemerataan pelayanan sosial dapat diwujudkan.

Dari perspektif manfaat kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Sebagian besar penerima bantuan memanfaatkan bantuan tersebut untuk membeli kebutuhan pangan, membiayai pendidikan anak, memenuhi kebutuhan kesehatan, serta mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial

telah berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial (*social safety net*) yang mampu menjaga daya beli masyarakat miskin dalam jangka pendek. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa bantuan sosial belum mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Sebagian besar penerima masih bergantung pada sektor informal, pertanian, perikanan, maupun pekerjaan harian dengan pendapatan yang tidak menentu. Oleh karena itu, bantuan sosial perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, pengembangan usaha produktif, serta peningkatan akses terhadap lapangan kerja agar mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap pengurangan kemiskinan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Singkil telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, akurasi data penerima manfaat, kapasitas sumber daya pelaksana, koordinasi antarlembaga, dan kondisi geografis wilayah. Oleh karena itu, penguatan pemutakhiran DTKS secara berkala, peningkatan kapasitas aparatur, perluasan sosialisasi kepada masyarakat, optimalisasi penggunaan SIKS-NG, serta pengembangan sistem pengaduan yang lebih transparan menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas kebijakan bantuan sosial di Kabupaten Aceh Singkil. Pembahasan ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di tingkat lapangan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Singkil secara umum telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, meliputi pendataan dan pengusulan calon penerima dari tingkat gampong, verifikasi dan validasi data, pemutakhiran data melalui DTKS dan SIKS-NG, koordinasi antaraktor, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima manfaat. Ditinjau berdasarkan model implementasi kebijakan Edwards III, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Para pelaksana pada umumnya telah menunjukkan komitmen dan responsivitas yang baik dalam memberikan pelayanan, menangani pengaduan, dan mendampingi masyarakat. Namun, efektivitas implementasi masih menghadapi sejumlah kendala, yaitu belum meratanya komunikasi kebijakan, keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur, keterlambatan pemutakhiran data penerima, perbedaan data antara tingkat gampong dan kabupaten, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Karakteristik geografis Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri atas wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan juga memengaruhi kecepatan pendataan, verifikasi, penyampaian informasi, dan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial. Bantuan sosial telah memberikan manfaat dalam mengurangi beban pengeluaran dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dalam jangka pendek, tetapi belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian ekonomi penerima secara berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas implementasi bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh ketepatan prosedur administratif, tetapi juga oleh akurasi data, kapasitas birokrasi lokal, efektivitas komunikasi dan koordinasi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan pelayanan dengan kondisi geografis masyarakat.

REKOMENDASI

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil perlu melakukan pemutakhiran DTKS secara berkala dan berkelanjutan melalui verifikasi lapangan yang melibatkan pemerintah gampong, pendamping sosial, operator SIKS-NG, dan masyarakat agar perubahan kondisi sosial ekonomi penerima dapat segera tercatat serta mengurangi risiko kesalahan inklusi dan eksklusi. Kapasitas aparatur perlu ditingkatkan melalui pelatihan pengelolaan data, penggunaan SIKS-NG, komunikasi publik, pelayanan pengaduan, dan verifikasi penerima bantuan, disertai penambahan sarana, anggaran operasional, dan tenaga pelaksana yang proporsional dengan luas wilayah pelayanan. Komunikasi kebijakan perlu diperluas melalui sosialisasi langsung, forum gampong, media informasi lokal, dan pendampingan yang

menggunakan bahasa sederhana agar masyarakat memahami persyaratan, prosedur pengusulan, mekanisme pemutakhiran data, dan alasan penetapan penerima bantuan. Koordinasi antara Dinas Sosial, kecamatan, pemerintah gampong, pendamping sosial, dan instansi terkait juga perlu diperkuat melalui pertemuan rutin, standar operasional prosedur yang jelas, integrasi data, serta sistem pengaduan yang transparan dan mudah diakses. Untuk menjangkau masyarakat pesisir dan kepulauan, pemerintah daerah perlu mengembangkan pelayanan sosial adaptif, seperti pelayanan bergerak, penjadwalan verifikasi berdasarkan kondisi transportasi laut, penempatan petugas penghubung di wilayah kepulauan, serta pemanfaatan sistem pelayanan luring ketika jaringan komunikasi tidak tersedia. Selain itu, bantuan sosial perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, pengembangan usaha produktif, akses permodalan, dan perluasan kesempatan kerja agar penerima tidak hanya memperoleh perlindungan jangka pendek, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemandirian dan keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan..

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Bappenas.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil. (2025). *Kabupaten Aceh Singkil dalam Angka 2025*. BPS Kabupaten Aceh Singkil.
- Barrientos, A. (2013). *Social assistance in developing countries*. Cambridge University Press.
- Coady, D., Grosh, M., & Hoddinott, J. (2004). *Targeting of transfers in developing countries: Review of lessons and experience*. World Bank.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Israel, M., & Hay, I. (2006). *Research ethics for social scientists*. SAGE Publications.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Pedoman operasional Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)*. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial RI.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (Edisi terbaru). Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
- World Bank. (2022). *Indonesia poverty assessment: Pathways towards economic security*. World Bank.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.